

Nama : Nabila Miyaty Wulandary

NPM : 2316041062

MK : Organisasi Internasional dan Globalisasi

## **Hubungan Kementerian Pariwisata dengan Organisasi Internasional dalam Pengembangan Pariwisata Indonesia**

### **Abstrak**

Tulisan ini membahas kerja sama antara Kementerian Pariwisata dengan berbagai organisasi internasional dalam mengembangkan sektor pariwisata Indonesia dari perspektif *global governance*. Kerja sama ini mencakup promosi wisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, keberlanjutan lingkungan, serta peningkatan daya saing global. Selain mendeskripsikan bentuk kerja sama dengan UN Tourism (UNWTO), *International Labour Organization* (ILO), serta mitra bilateral dan multilateral lainnya, tulisan ini juga menganalisis efektivitas, manfaat, dan tantangan implementasinya. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerja sama internasional memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pengembangan pariwisata Indonesia, namun masih menghadapi kendala dalam koordinasi, pemerataan manfaat, serta implementasi di tingkat daerah.

### **1. Pendahuluan**

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu meningkatkan devisa negara, membuka lapangan kerja, dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam era globalisasi, pengembangan sektor pariwisata tidak lagi dapat dilakukan secara mandiri oleh suatu negara, melainkan membutuhkan kerja sama dengan berbagai aktor internasional. Hal ini sejalan dengan konsep *global governance* yang menekankan pentingnya peran organisasi internasional dalam membantu negara mengatasi berbagai isu global melalui kerja sama lintas negara. Menurut *World Tourism Organization* (UN Tourism), kerja sama internasional dalam sektor pariwisata dapat membantu negara dalam meningkatkan daya saing melalui pertukaran pengetahuan, standar global, dan praktik terbaik. Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata Indonesia menjalin berbagai kerja sama dengan organisasi internasional sebagai strategi untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat global. Namun demikian, kerja sama tersebut tidak hanya perlu dilihat dari sisi manfaat, tetapi juga perlu dianalisis secara kritis untuk mengetahui sejauh mana dampaknya terhadap pembangunan pariwisata nasional.

### **2. Kerja Sama dengan UN Tourism (UNWTO)**

#### **2.1 Posisi Indonesia dalam Struktur UN Tourism**

Indonesia memiliki peran penting di UN Tourism sebagai anggota Dewan Eksekutif. Posisi ini membuat Indonesia bisa ikut dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pariwisata dunia. Pada November 2024, Indonesia ikut dalam pertemuan internasional di Kolombia untuk membahas isu-isu penting di sektor pariwisata global.

## 2.2 Bentuk Pemanfaatan Keanggotaan

Kerja sama Indonesia dengan UN Tourism memberikan posisi strategis bagi Indonesia dalam percaturan pariwisata global. Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Eksekutif memungkinkan Indonesia terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pariwisata internasional. Selain itu, berbagai program seperti *Best Tourism Villages* dan forum internasional memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan visibilitas destinasi wisata di mata dunia. Manfaat dari kerja sama ini belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Program-program internasional cenderung lebih banyak dinikmati oleh daerah yang sudah memiliki kesiapan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia yang baik. Sementara itu, daerah yang masih berkembang seringkali mengalami keterbatasan dalam mengakses program tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata dalam kerangka global tidak selalu menghasilkan manfaat yang merata, melainkan cenderung lebih menguntungkan daerah yang memiliki kapasitas infrastruktur dan sumber daya manusia yang lebih baik. Dalam konteks ini, kerja sama internasional berpotensi memperkuat ketimpangan pembangunan antarwilayah apabila tidak diiringi dengan kebijakan afirmatif yang mendukung daerah tertinggal (Scheyvens et al., 2017).

Selain itu, partisipasi dalam forum internasional belum tentu secara langsung berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan, karena masih banyak faktor lain seperti aksesibilitas, promosi, dan kondisi global yang mempengaruhi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terarah agar keanggotaan Indonesia dalam UN Tourism tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi pembangunan pariwisata.

## 3. Kerja Sama dengan Maladewa

Kerja sama antara Indonesia dan Maladewa dalam sektor pariwisata menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat hubungan bilateral, khususnya dalam pengembangan pariwisata bahari. Kedua negara memiliki potensi besar di sektor ini sehingga kerja sama dalam bentuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman menjadi sangat relevan. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasinya. Maladewa dikenal dengan konsep wisata premium dan eksklusif, sedangkan Indonesia memiliki karakteristik yang lebih beragam dengan skala yang jauh lebih besar. Perbedaan ini dapat menjadi tantangan apabila Indonesia mencoba mengadopsi model pengelolaan pariwisata dari Maladewa secara langsung tanpa penyesuaian. Oleh karena itu, kerja sama ini perlu disesuaikan dengan kondisi lokal Indonesia agar tetap efektif dan tidak menimbulkan ketimpangan dalam pengembangan destinasi wisata.

#### **4. Kerja Sama dengan *International Labour Organization* (ILO)**

Kerja sama antara Kementerian Pariwisata dan *International Labour Organization* (ILO) dalam pengembangan pariwisata hijau merupakan langkah penting dalam menjawab isu keberlanjutan yang semakin menjadi perhatian global. Program ini tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja yang ramah lingkungan atau *green jobs*. Implementasi program ini masih menghadapi berbagai tantangan. Kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas masih terbatas pada wilayah tertentu dan belum menjangkau seluruh daerah wisata di Indonesia. Selain itu, tingkat kesadaran pelaku industri pariwisata terhadap pentingnya praktik ramah lingkungan juga masih bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun konsep pariwisata hijau sudah diperkenalkan, penerapannya masih membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih kuat serta pengawasan yang berkelanjutan agar dapat memberikan dampak yang signifikan.

#### **5. Kerja Sama antara Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dengan *United States–ASEAN Business Council* (US-ABC)**

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menjajaki perluasan kerja sama pengembangan bisnis pariwisata dengan *United States–ASEAN Business Council* (US-ABC) melalui pertemuan pada Desember 2024 di Jakarta. Dalam forum tersebut, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana memaparkan kondisi terkini pariwisata Indonesia yang menunjukkan peningkatan signifikan jumlah wisatawan mancanegara, serta target kontribusi sektor pariwisata hingga 2029. Pemerintah menegaskan komitmennya pada pengembangan pariwisata berkelanjutan yang tidak hanya mendorong ekonomi, tetapi juga menjaga lingkungan dan budaya. Kemenpar juga menawarkan berbagai program unggulan (*quick win*), seperti penguatan kampanye wisata domestik, digitalisasi melalui Tourism 5.0, penurunan harga tiket pesawat, dan peningkatan kualitas SDM pariwisata. Selain itu, dipaparkan pula berbagai inisiatif keberlanjutan seperti penghitungan jejak karbon, peta jalan dekarbonisasi, ekonomi sirkular, sertifikasi pariwisata berkelanjutan, dan kampanye lingkungan.

Melalui kerja sama ini, diharapkan tercipta kolaborasi konkret antara pemerintah Indonesia dan sektor swasta AS yang tergabung dalam US-ABC untuk mempercepat pertumbuhan pariwisata, meningkatkan investasi, serta memberikan manfaat inklusif bagi masyarakat dan industri lokal. US-ABC sendiri menyatakan komitmen dan optimisme untuk mendukung akselerasi sektor pariwisata Indonesia melalui berbagai masukan dan inisiatif dari perusahaan anggotanya.

#### **6. Kerja Sama Lainnya**

Indonesia juga aktif dalam berbagai forum internasional seperti ASEAN Tourism Forum dan APEC sebagai bagian dari upaya diplomasi pariwisata. Melalui forum tersebut, Indonesia dapat

berbagi pengalaman dan mempelajari praktik terbaik dari negara lain. Selain itu, diplomasi budaya juga menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan daya tarik pariwisata Indonesia melalui promosi seni dan budaya di tingkat internasional.

Namun, efektivitas dari kegiatan tersebut tidak selalu mudah untuk diukur secara langsung. Meskipun partisipasi dalam forum internasional dapat meningkatkan citra Indonesia, dampaknya terhadap peningkatan jumlah wisatawan tidak selalu signifikan dalam jangka pendek. Selain itu, persaingan antar negara dalam menarik wisatawan juga semakin ketat, sehingga Indonesia perlu memiliki strategi branding yang lebih kuat dan konsisten agar dapat bersaing di pasar global.

## **7. Tantangan dan Peluang**

Dalam pelaksanaan kerja sama internasional, Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti tingginya biaya keanggotaan organisasi internasional, kompleksitas koordinasi antar lembaga, serta kesiapan sumber daya manusia di daerah. Selain itu, masih terdapat ketimpangan infrastruktur antar wilayah yang mempengaruhi efektivitas implementasi program.

Di sisi lain, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan, seperti akses ke pasar internasional yang lebih luas, peningkatan kapasitas melalui pelatihan global, serta tren pariwisata berkelanjutan yang semakin berkembang. Digitalisasi juga menjadi peluang penting dalam meningkatkan promosi dan pengelolaan pariwisata secara lebih efektif.

## **8. Kesimpulan**

Kerja sama internasional Kemenparekraf dengan organisasi seperti UN Tourism dan ILO merupakan strategi penting dalam mengembangkan sektor pariwisata Indonesia yang berdaya saing global. Melalui berbagai program peningkatan kapasitas, pertukaran pengetahuan, dan implementasi praktik pariwisata berkelanjutan, Indonesia berpotensi menjadi salah satu destinasi utama wisata dunia.

Ke depan, penguatan kerja sama ini perlu terus dilakukan dengan fokus pada inovasi, keberlanjutan, dan pengembangan sumber daya manusia. Evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan bahwa keanggotaan Indonesia di berbagai organisasi internasional memberikan manfaat nyata bagi pengembangan pariwisata nasional sesuai dengan amanat regulasi yang berlaku.

## **Daftar Pustaka**

Antara News Makassar. (2024, November 2). *Kemenparekraf memaksimalkan UN Tourism untuk daya saing pariwisata*. <https://makassar.antarane.ws.com/berita/567949/kemenparekraf-memaksimalkan-un-tourism-untuk-daya-saing-pariwisata>

Antara News. (2024, November 2). *Kemendikbudristek maksimalkan UN Tourism untuk daya saing pariwisata*. <https://www.antaraneews.com/berita/4438073/kemendikbudristek-maksimalkan-un-tourism-untuk-daya-saing-pariwisata>

Antara News. (2025, April 10). *Indonesia sambut peluang kerja sama bidang pariwisata dengan Maladewa*. <https://www.antaraneews.com/berita/4775001/indonesia-sambut-peluang-kerja-sama-bidang-pariwisata-dengan-maladewa>

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2026, February 25). *Kerja sama internasional Kemendikbudristek untuk meningkatkan pariwisata Indonesia*. <https://kemendikbudristek.id/kerja-sama-internasional-kemendikbudristek-untuk-meningkatkan-pariwisata-indonesia/>

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. (2024, Desember 4). *Siaran pers: Kemendikbudristek jajaki perluasan kerja sama pariwisata bersama United States-ASEAN Business Council (US-ABC)*. <https://kemendikbudristek.go.id/berita/siaran-pers-kemendikbudristek-jajaki-perluasan-kerja-sama-pariwisata-bersama-united-states-asean-business-council-us-abc>

Scheyvens, R., & Biddulph, R. (2017). Inclusive tourism development. *Tourism Geographies*, 20(4), 589–609.

United Nations Indonesia. (2024, May 3). *Menghijaukan sektor pariwisata: Kementerian Pariwisata dan ILO memulai implementasi proyek untuk membantu menciptakan lapangan kerja ramah lingkungan*. <https://indonesia.un.org/id/267713-menghijaukan-sektor-pariwisata-kementerian-pariwisata-dan-ilo-memulai-implementasi-proyek>